

## DRAMATURGI POLITIKUS PEREMPUAN PARIAMAN DI PARLEMEN DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI PROPINSI SUMBAR

Akdila Bulanov, Penmardianto, Muhammad Taufik, Muhammad Azamul Haq

UIN Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia

*akdilabulanov@uinbukittinggi.ac.id, penmardianto@uinbukittinggi.ac.id,  
taufikm413@gmail.com, theazamulhaq@gmail.com*

---

### Abstrak

#### Article History

Received : 22-02-2025

Revised : 21-04-2025

Accepted : 01-05-2025

#### Keywords:

Strategy, Mass Media,  
Thematic Hadith.

*This study aims to analyze the dramatization of female politicians in Pariaman, West Sumatra Province, focusing on the perspective of ulama regarding their roles and contributions to local politics. Using a descriptive qualitative approach, this research explores how female politicians construct their image and identity on the political stage, as well as the challenges and support they encounter within the context of local cultural and religious norms and values. Data were collected through in-depth interviews with several female politicians in the parliament, along with ulama who hold influence in the community. The findings indicate that female politicians in Pariaman utilize communication strategies that reflect Islamic values to gain legitimacy from the public. The support from ulama plays a crucial role in shaping public perception of women's involvement in politics, positively influencing societal acceptance. The study also identifies various challenges faced, including gender stigma, patriarchal norms, and structural barriers that limit the political participation of female politicians. These findings provide new insights into the interaction between gender, religion, and politics in West Sumatra, as well as the importance of dialogue between female politicians and ulama in fostering stronger support for women's roles. This research is expected to serve as a reference for policies and programs that encourage increased political participation of women at the local level, contributing to the development of gender studies within the context of Indonesian politics.*

---

## Pendahuluan

Tuntutan peningkatan peran politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998 setelah turunnya Orde Baru. Isu dan wacana perempuan makin berkembang sejak tahun 1999, ketika pemerintah dan partai-partai politik yang ada sibuk mempersiapkan Pemilu 1999, Pemilu pertama di era reformasi. Pada Pemilu 1999 tersebut untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan dikedepankan dalam kampanye (Saraswati, 2004:32).

Keterwakilan 30% perempuan di parlemen telah diatur oleh banyak undang-undang, diantaranya UU.No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU.No.8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU.No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Regulasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan partai politik tercakup dalam UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 8 Tahun 2008, dan UU No. 10 Tahun 2008. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan No.22-24/PUU-VI/2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD kemudian membatalkan pasal 214 (Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan No.22-24/PUU-VI/2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD)

UU No.10 tahun 2008 dengan menghapuskan sistem nomor dalam penentuan anggota legislatif. Dengan adanya putusan tersebut maka hak semua caleg untuk dapat duduk dalam parlemen menjadi sama. Maka dari itu apakah setiap perempuan mampu meraih kemenangan untuk duduk diparlemen, dengan menunjukkan kemampuannya bahwa berpolitik adalah juga salah satu keahlian dari perempuan? Pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur dengan ketat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 (Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan No.22-24/PUU-VI/2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD).

Dalam hal keterwakilan perempuan di DPRD, terdapat fenomena menarik yang terjadi di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang mayoritas beragama Islam. Di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, permasalahan gender terasa begitu kuat, walaupun Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman memiliki sistem matrilineal, namun dalam konteks tataran sosial, budaya dan politik, laki-laki lebih dominan dari perempuan. Mochtar Naim menunjukkan bahwa perempuan minangkabau memang memiliki beberapa keistimewaan untuk dapat berlaku sebagai pemeran aktif, akan tetapi peranan politik yang esensial tetap ada pada laki-laki. (Naim, 1996:50).

Beberapa ulama tradisional melarang perempuan untuk memimpin secara umum, karena berkaca dari hadits HR. Bukhari no. 4425 yang artinya "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita." (HR. Bukhari, no. 4425).

Akan tetapi dalam Al-Qur'an menyebutkan bayi perempuan yang lahir sebagai berita gembira dari Allah, dan oleh karena itu tidak pantas kehadirannya disambut dengan rasa malu seperti yang terjadi sebelumnya. Q.S. An-Nahl/ 16 : 58-59. Menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam Al-Qur'an. (Umar, 2001:33).

Pada periode tahun 2019-2024 jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Pariaman memang sama dari periode tahun 2014-2019 hanya 1 (satu)

orang yaitu Ibu Fitri Nora yang pernah menjadi Ketua DPRD Kota Pariaman dari total keseluruhan sebanyak 20 jumlah anggota legislatif di DPRD Kota Pariaman. Pada periode tahun 2019-2024 jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan dari 2 (dua) menjadi tidak ada dari total keseluruhan sebanyak 40 jumlah anggota legislatif di DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Pada periode tahun 2019-2024 jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Sumatera Barat mengalami penurunan dari 7 (tujuh) orang menjadi 4 (empat) orang yaitu Leli Arni, Ibu Siti Izzati Aziz, Mesra, dan Yunisra Syahiran dan hanya satu orang yang berasal dari Pariaman yaitu Ibu Siti Izzati Aziz sebagai wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). dari total keseluruhan sebanyak 65 jumlah anggota legislatif di DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Informasi resmi mengenai pemilu dapat diakses melalui situs KPU (<https://infopemilu.kpu.go.id/>).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan kajian pada Dramaturgi Politik Perempuan Pariaman di Parlemen dalam Perspektif Ulama di Sumatera Barat?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pandangan ulama di Sumbar tentang peran politik perempuan pariaman .
2. Untuk menganalisis implementasi peran politikus perempuan pariaman di DPRD.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara mendetail berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen. Dalam konteks penelitian "Dramaturgi Politik Perempuan Pariaman di Parlemen dalam Perspektif Ulama di Provinsi Sumbar", metode ini akan diterapkan untuk menggambarkan perilaku dan peran politikus perempuan dalam panggung politik, serta bagaimana perspektif ulama setempat terhadap fenomena ini.

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat atau objek dilakukannya penelitian. Menurut Sukma Dinata lokasi penelitian berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana seorang terlibat dalam kegiatan penelitian (Sukma Dinata, 2009:102). Lokasi penelitian ini berada di Kota Padang dan Kota Pariaman. Lokasi ini dipilih karena terdapat sejumlah politikus perempuan yang aktif di parlemen dan memiliki peran signifikan dalam politik lokal. Selain itu, Kota Padang dan Kota Pariaman merupakan daerah yang memiliki pengaruh budaya dan agama yang kuat, yang menjadi relevan dalam memahami pandangan ulama terhadap peran perempuan dalam politik. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan November 2024.

Informan penelitian adalah seseorang atau sumber yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai objek penelitian yang dilakukan. Untuk menentukan informan penelitian, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yakni penentuan informan yang dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu (A. Muri Yusuf, 2014:369). Informan dalam sebuah penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data tentang penelitian tersebut. Informan yang dimaksud adalah orang yang di wawancarai dan di mintai

informasinya atau orang di perkirakan memahami data, informasi atau fakta dari suatu objek penelitian (Ajat Rukajat, 2018:18).

Informan dalam penelitian ini ialah Ibu Fitri Nora (Anggota DPRD Kota Pariaman), Bapak Riza Saputra (Anggota DPRD Kota Pariaman), Bapak Muhamad Fahreza (Sekretariat DPRD Kota Pariaman), Bapak Nazaruddin (Sekretariat DPRD Kota Pariaman), Ibu Siti Izzati Azis (Anggota DPRD Propinsi Sumbar), Bapak Zarfi Deson (Anggota DPRD Propinsi Sumbar), Bapak Zainal (Sekretariat DPRD Propinsi Sumbar), Bapak Marwan Lubis (Sekretariat MUI Sumbar), Bapak Sofyan Jamal (Ketua MUI Kota Pariaman), Bapak Zulkarnaini (Bagian Fatwa MUI Sumbar).

Sumber data merupakan suatu hal yang paling penting dalam penelitian. Dimana menurut Lexy. J. Moleong sumber data yang paling utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan data yang akurat dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada tiga langkah dalam melakukan analisis data menurut model Milles dan Burman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Lexy J. Moleong, 2002:4).

## **Pembahasan**

### **Pandangan Ulama Di Sumbar Tentang Peran Politik Perempuan**

Pandangan ulama di Sumatera Barat mengenai peran politik perempuan memiliki variasi yang dipengaruhi oleh latar belakang agama, budaya Minangkabau, dan adat istiadat setempat. Sumatera Barat dikenal dengan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, di mana perempuan memiliki posisi penting dalam struktur keluarga dan adat. Namun, dalam konteks politik dan peran publik, pandangan tersebut lebih beragam, terutama di kalangan ulama.

Ada beberapa pandangan ulama di Sumatera Barat terkait dengan peran politik perempuan, diantaranya adalah. Pertama terdapat pandangan ulama tradisional dan konservatif, Ulama tradisional dan konservatif di Sumatera Barat umumnya memiliki pandangan yang membatasi peran perempuan dalam politik dan kepemimpinan. Pandangan ini biasanya berakar pada interpretasi ajaran Islam yang lebih ketat dan penerapan adat Minangkabau yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin di ruang publik. Ada beberapa alasan yang mempengaruhi ulama konservatif dan tradisional berpendapat demikian seperti, Prioritas Peran Domestik. Pandangan ulama tradisional dan konservatif di Sumatera Barat yang memprioritaskan peran domestik perempuan sangat dipengaruhi oleh interpretasi mereka terhadap ajaran agama dan nilai-nilai budaya Minangkabau. Dalam pandangan ini, peran perempuan yang utama dan paling mulia adalah sebagai ibu dan istri yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak-anak.

Selanjutnya ada Kepemimpinan Publik sebagai Peran Laki-laki. Dalam pandangan ulama tradisional dan konservatif di Sumatera Barat, kepemimpinan publik secara umum dianggap sebagai peran yang lebih sesuai bagi laki-laki. Hal ini didasarkan pada interpretasi agama Islam yang diyakini mereka, serta nilai-nilai budaya Minangkabau yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin di ranah

publik.

Kedua ada ulama progresif, Pandangan ulama progresif terhadap peran politik perempuan didasari pada keyakinan bahwa perempuan memiliki hak, kapasitas, dan tanggung jawab yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan pengambilan keputusan. Ulama progresif menilai bahwa Islam mendukung peran aktif perempuan di masyarakat dan tidak membatasi keterlibatan mereka dalam bidang politik, selama mereka berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Adapun beberapa alasannya adalah sebagai berikut, pertama. Dasar-Dasar Teologis yang Mendukung Kesetaraan. Dasar-dasar teologis yang mendukung kesetaraan dalam Islam didasari pada prinsip bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab dan hak untuk menjalankan peran sosial, ekonomi, dan politik demi kemaslahatan umat. Ulama progresif di Sumbar menekankan bahwa kesetaraan ini ditegaskan oleh berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang memperlakukan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah yang setara dalam tugas dan kewajibannya di muka bumi.

Kedua, Referensi Sejarah Islam: Perempuan dalam Kepemimpinan. Referensi sejarah Islam mengenai perempuan dalam kepemimpinan menurut ulama progresif di Sumbar memberikan bukti konkret tentang peran aktif dan penting yang dimainkan oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Sejak masa awal Islam, terdapat banyak contoh yang menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kemampuan untuk memimpin dan berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, Peran Unik Perempuan dalam Memajukan Kebijakan Sosial. Peran unik perempuan dalam memajukan kebijakan sosial sangat dihargai oleh ulama progresif di Sumatera Barat (Sumbar), yang melihat keterlibatan perempuan dalam politik sebagai aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Dalam pandangan mereka, perempuan tidak hanya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan kebijakan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keempat, Pandangan tentang Hak dan Kewajiban yang Setara. Ulama progresif di Sumbar meyakini bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Perempuan berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat. Mereka mendukung partisipasi perempuan dalam legislatif, eksekutif, dan struktur kepemimpinan lainnya. Ulama progresif di Sumbar menekankan pentingnya hak suara bagi perempuan dalam pemilihan umum sebagai langkah untuk mengakui kehadiran dan suara mereka dalam sistem politik.

Ulama progresif di Sumbar juga menekankan bahwa hak perempuan dalam politik disertai dengan kewajiban untuk berkontribusi pada Masyarakat. Perempuan memiliki tanggung jawab untuk mendidik generasi mendatang dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang positif. Mereka diharapkan untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas. Ulama progresif di Sumbar mendorong perempuan untuk aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan lainnya dan berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan yang lebih luas.

Ulama progresif di Sumbar percaya bahwa kesetaraan hak perempuan juga

mencakup akses yang setara terhadap sumber daya.

Ulama progresif di Sumbar mendukung upaya untuk memberikan akses pendidikan dan pelatihan yang sama kepada perempuan sehingga perempuan dapat mengembangkan kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam politik, mendorong penciptaan peluang ekonomi yang setara bagi perempuan yang pada gilirannya akan memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih aktif dalam masyarakat dan politik, mendorong adanya advokasi untuk perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum, mendukung pengesahan kebijakan yang menjamin kesetaraan gender dalam semua bidang, termasuk politik. Hal ini mencakup perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

Ulama progresif di Sumbar menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam merumuskan kebijakan publik yang menjamin hak-hak mereka, dan untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan penindasan. Ulama progresif di Sumbar percaya bahwa pendidikan dan kesadaran gender sangat penting untuk mencapai kesetaraan hak dan kewajiban. Ulama progresif di Sumbar berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam politik dan pentingnya menghapuskan praktik-praktik diskriminatif yang menghalangi keterlibatan perempuan.

Kelima, Pembaharuan Pemahaman terhadap Ayat dan Hadis yang Sering Disalahpahami. Ulama progresif di Sumatera Barat (Sumbar) mendorong pembaharuan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang sering disalahpahami dalam konteks peran politik perempuan. Mereka percaya bahwa banyak teks-teks keagamaan yang telah dipahami secara sempit atau diterapkan secara tidak tepat, sehingga menimbulkan persepsi bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Keenam, Pentingnya Kepemimpinan Perempuan dalam Menghadapi Tantangan Zaman. Ulama progresif di Sumbar menyadari bahwa kepemimpinan perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam pandangan mereka, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Ulama progresif di Sumbar menganggap kepemimpinan perempuan sebagai elemen kunci dalam menghadapi tantangan zaman. Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik dan sosial diharapkan dapat membawa perspektif baru, solusi inovatif, dan perubahan positif bagi masyarakat. Melalui advokasi, pendidikan, dan kerjasama, ulama progresif berupaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana perempuan dapat berperan aktif dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi semua.

### **Implementasi Peran Politikus Perempuan Pariaman di DPRD**

Sama seperti laki-laki, perempuan adalah manusia mukallaf. Perempuan diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya. Perempuan juga diharuskan untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhannya serta, meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan-Nya, mematuhi aturan-Nya, dan beramar ma'ruf nahi munkar (Qardhawi, 1995, hlm. 521).

Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan: perempuan diberi kesempatan untuk meniti karir sebagaimana laki-laki juga diberi kesempatan untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Selain itu, Islam memberikan kaum perempuan kesempatan untuk bekerja dan mengembangkan sepenuhnya potensi dirinya. (Yasid, 2005:303).

Semua firman dan sabda Pembuat Syariat di dalamnya meliputi kaum perempuan, kecuali jika ada dalil tertentu yang mengkhususkannya untuk kaum laki-laki. Apabila Allah swt Berfirman, “wahai manusia” atau “wahai orang-orang yang beriman”, maka kaum perempuan juga tercakup di dalamnya, tanpa diperselisihkan. (Qardhawi, 1995: 522).

Keadilan sangat penting dalam Islam. Keadilan Islam mencakup persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan serta tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, Islam tidak meyakini bahwa hak laki-laki dan perempuan adalah sama. Islam juga menetapkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun keduanya tidak sepenuhnya sama atau identik. Kata “kesetaraan” memiliki kesakralan tertentu karena mengandung konsep keadilan dan non-diskriminasi. (Mutahhari, 1985:93).

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 32 yang artinya:

“Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

Namun demikian, Islam memberikan rambu-rambu yang mesti dipatuhi. Menyangkut masalah ini Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”

Arti ayat di atas adalah perintah kepada wanita untuk tetap berada di rumah. Meskipun ayat ini ditujukan kepada istri para rasul, perintah dalam ayat ini juga berlaku bagi wanita lainnya. Namun, perintah ini tidak bisa dianggap ketat. (Yasid, hlm. 304). Hal ini karena ada kalanya seorang perempuan tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah, misalnya ketika perempuan tidak mempunyai keluarga yang merawatnya atau suami yang melindunginya, atau ketika dalam kondisi sakit atau lemah. Oleh karena itu, ayat ini tidak sepenuhnya melarang perempuan bekerja di luar rumah. Islam pada prinsipnya tidak melarang perempuan untuk bekerja atau berkarir. (Shihab, 1996, hlm. 304-305).

Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora sebagai Anggota DPRD, memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur, perhubungan, dan layanan publik. Berikut adalah beberapa peran utama :

Pengawasan dan Evaluasi. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora memantau pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah terkait infrastruktur dan pelayanan publik. Sebagai anggota DPRD, Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora telah melakukan beberapa kegiatan pengawasan dan evaluasi dalam konteks tugasnya. Beberapa contoh kegiatan yang mungkin telah dijalankannya meliputi:

a. Monitoring Proyek Pembangunan. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora

melakukan kunjungan lapangan untuk memantau perkembangan proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik, untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan anggaran.

- b. Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora mengadakan RDP dengan masyarakat dan stakeholder terkait untuk mendengar langsung masukan dan keluhan mengenai kebijakan dan program yang sudah berjalan.
- c. Evaluasi Program Pemerintah. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora mengkaji efektivitas program pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
- d. Laporan Kinerja. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora menyusun laporan berkala mengenai hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan, yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan kebijakan ke depan.
- e. Kolaborasi dengan Instansi Terkait. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora bekerja sama dengan dinas terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
- f. Sosialisasi Hasil Evaluasi. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora menyampaikan hasil pengawasan dan evaluasi kepada masyarakat agar mereka memahami kondisi dan perkembangan yang ada.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora berkontribusi dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan program pemerintah di Propinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman.

2. Penyusunan Raperda. Ibu Siti Izzati Aziz dan Fitri Nota terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebagai anggota DPRD, Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora telah terlibat dalam penyusunan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang penting untuk masyarakat. Beberapa aspek yang mungkin telah ia kerjakan dalam proses ini meliputi:
  - a. Identifikasi Isu Penting. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu diatur melalui Raperda, seperti perlindungan lingkungan, peningkatan pelayanan publik, atau pengembangan ekonomi lokal.
  - b. Diskusi dan Konsultasi. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora mengadakan diskusi dengan stakeholder, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan instansi pemerintah untuk mendapatkan masukan dan pandangan terkait isu yang akan diatur.
  - c. Penyusunan Draf Raperda. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora terlibat dalam penyusunan draf Raperda yang mencakup tujuan, ruang lingkup, dan ketentuan yang jelas untuk memandu implementasinya.
  - d. Rapat Pembahasan. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora menghadiri rapat-rapat pembahasan di tingkat komisi dan pleno untuk mendiskusikan

Raperda, melakukan revisi, dan mendapatkan persetujuan.

- e. Sosialisasi. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Raperda yang sedang disusun, menjelaskan manfaat dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari.
- f. Pengawasan Proses Legislasi. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora memastikan bahwa proses pembahasan dan pengesahan Raperda berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hingga akhirnya disetujui oleh DPRD dan ditetapkan menjadi Perda.

Melalui kegiatan ini, Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora berupaya menciptakan regulasi yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Propinsi Sumatera Barat dan di Kota Pariaman.

- 3. Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora menampung dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam bidang infrastruktur dan layanan publik. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora, sebagai anggota DPRD, telah menjalankan berbagai kegiatan untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat. Beberapa contoh kegiatan yang mungkin dilakukan meliputi:

- a. Sosialisasi dan Dialog. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora mengadakan pertemuan dengan warga untuk mendengarkan langsung aspirasi, keluhan, dan kebutuhan mereka terkait berbagai isu, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
- b. Pengaduan Resmi. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora membuka saluran komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau usulan, baik melalui media sosial, surat, maupun pertemuan langsung.
- c. Kunjungan Lapangan. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora melakukan kunjungan ke komunitas atau daerah tertentu untuk memahami lebih dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi bersama.
- d. Rapat Dengar Pendapat (RDP). Siti Izzati Aizz dan Ibu Fitri Nora mengorganisir RDP dengan kelompok masyarakat atau organisasi lokal untuk menggali informasi dan masukan terkait kebijakan atau program pemerintah.
- e. Penyusunan Laporan. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora mengumpulkan dan menyusun laporan dari hasil dialog dan kunjungan, kemudian menyampaikannya kepada pihak terkait di pemerintahan untuk ditindaklanjuti.
- f. Kemitraan dengan Organisasi. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan dalam menerima aspirasi dan memastikan bahwa suara masyarakat terdengar.

Dengan kegiatan-kegiatan ini, Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora berusaha memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.

4. Koordinasi dengan Pemda. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora, sebagai anggota DPRD, telah melakukan beberapa bentuk koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan pelaksanaan program dan kebijakan berjalan lancar. Beberapa kegiatan yang mungkin dilakukannya meliputi:
  - a. Rapat Koordinasi. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora menghadiri rapat-rapat koordinasi dengan Pemda untuk membahas program pembangunan, kebijakan, dan isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat.
  - b. Diskusi Tentang Raperda. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora berkolaborasi dengan Pemda dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
  - c. Monitoring Proyek Bersama. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora bekerja sama dengan instansi terkait untuk memantau pelaksanaan proyek pembangunan yang sedang berjalan, agar sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
  - d. Penyampaian Aspirasi Masyarakat. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat kepada Pemda agar dapat direspons dan ditindaklanjuti secara tepat.
  - e. Evaluasi Program. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora berpartisipasi dalam evaluasi program yang telah dilaksanakan oleh Pemda, memberikan masukan berdasarkan hasil pengawasan dan *feedback* dari masyarakat.
  - f. Kegiatan Sosialisasi Bersama. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora mengadakan kegiatan sosialisasi bersama Pemda untuk menjelaskan kebijakan atau program tertentu kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih memahami dan dapat berpartisipasi.

Melalui koordinasi ini, Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora berupaya memastikan bahwa program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pariaman.

5. Sosialisasi Program. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora melakukan sosialisasi terkait program-program pemerintah kepada masyarakat agar lebih memahami dan berpartisipasi. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora, sebagai anggota DPRD, telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan dan inisiatif pemerintah. Beberapa contoh kegiatan yang mungkin dilakukan meliputi:
  - a. Pertemuan Warga. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora mengadakan pertemuan di tingkat kelurahan atau desa untuk menjelaskan program-program pemerintah, seperti program pembangunan, kesehatan, dan pendidikan.
  - b. Kampanye Informasi. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora melakukan

kampanye informasi melalui media sosial, pamflet, atau spanduk untuk menyampaikan informasi penting terkait kebijakan atau program yang sedang berjalan.

- c. Diskusi Publik. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora menyelenggarakan diskusi publik yang melibatkan masyarakat, tokoh lokal, dan pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu terkini dan program pemerintah. Ibu Fitri Nora sebagai Anggota DPRD Kota Pariaman menjadi narasumber Diskusi publik Perempuan dan Uang Japutan bersama kaum milenial Kota Pariaman di Cermin Kopi yang gelar oleh Pariaman Kumpul Diskusi (Parkusi). Hadir juga sebagai narasumber yakni LKAAM Kota Pariaman Priyaldi, Fatahillah Hidayat Psikologi Klinis, Masril KAN V Koto Aia Pampan dan Anya Aihabibah Khainof. Ibu Fitri Nora menyampaikan, pada saat timbul rasa perhatian dan kepedulian makanya pihaknya berharap ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk memproduksi masalah adat dan budaya. Ibu Fitri Nora mengatakan, sosialisasi harus dilakukan terus- menerus karena kalau tidak sosialisasi bagaimana mereka atau anak-anak tahu dan lembaga adat menjadi sahabat anak-anak. Menurutnya, komunikasi antara kedua belah pihak dan diajarkan itu bentuk komunikasi orang tua menjadi teman bagi anak-anak. Teman pertama itu adalah orang tua, jangan di luar saja karena kadang-kadang dia mungkin tidak sama dengan apa yang kita terapkan di rumah.
- d. Bengkel Kerja (*Workshop*). Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora mengadakan *workshop* atau pelatihan untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang program-program tertentu, seperti pengembangan ekonomi atau kewirausahaan.
- e. Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora bekerja sama dengan LSM untuk menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka terkait program pemerintah.
- f. Kunjungan Lapangan. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora melakukan kunjungan ke lokasi program untuk menjelaskan secara langsung kepada masyarakat tentang manfaat dan cara berpartisipasi dalam program tersebut. Salah satu kegiatan kunjungan yang dilakukan Ibu Siti Izzati Aziz yaitu kunjungan ke Nagari Balah Aie Kabupaten Padang Pariaman. Kunjungan ini juga dihadiri oleh Wali Nagari beserta jajarannya, BAMUS, Bhabinkantimas, Ketua KAN dan Anggota, Bundo Kandung, Kader PKK,

Posyandu, pemuda dan pemudi. Nagari Balah Aie merupakan salah satu nagari pemekaran pada tahun 2017 lalu di Kabupaten Padang Pariaman, terdiri dari 4 korong, Korong Toboh, Sikumbang, Limau Hantu, Toboh Mandailing dan Lohong. Jumlah penduduk di Nagari Balah Aie sebanyak 4200 orang dan jumlah pemilih sebanyak  $\pm$  3.008. Mata pencaharian

sebagian masyarakat Balah Aie adalah bertani sawah, hampir 50 % dan di sisanya pada sektor perdagangan. Untuk sumber air bersih berasal dari irigasi ujung gunung. Dari pertemuan tersebut, didapat beberapa aspirasi diantaranya :

- 1) Korong Toboh Sikumbang
  - a) Peningkatan jalan Tampek Piriang Simpang Empat
  - b) Peningkatan jalan lingkar kantor Desa Toboh Sikumbang
  - c) Peningkatan jalan lingkung petak pisang
- 2) Korong Limau Hantu
  - a) Peningkatan jalan lingkung Baringin
  - b) Pengadaan Mesin Bajak (hand traktor) 8,5 Pk untuk kelompok tani Baringin Sakato
- 3) Korong Toboh Mandahiling
  - a) Peningkatan jalan Simpang Laga-Laga- Masjid Raya Toboh Mandahiling
  - b) Pengadaan Mesin Bajak (hand traktor) 8,5 Pk untuk kelompok tani Kampung Tengah
  - c) Bantuan dana untuk Majelis Taklim
- 4) Korong Lohong
  - a) Peningkatan rajang Lohong menjadi jembatan
  - b) Peningkatan jalan lahan Surau Lohong Mudik
  - c) Bantuan bibit sayur dan tanaman untuk KWT dan Desa Wisma

Dengan kegiatan-kegiatan ini, Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora berusaha memastikan masyarakat, memahami dan dapat berpartisipasi aktif dalam program-program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

6. Analisis dan Riset. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora melakukan penelitian dan analisis terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk memberikan rekomendasi yang tepat. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora, sebagai anggota DPRD, telah melakukan beberapa analisis dan riset untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa kegiatan yang mungkin dilakukan meliputi:
  - a. Studi Kelayakan Proyek. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora melakukan analisis terhadap proyek pembangunan yang diusulkan untuk memastikan bahwa proyek tersebut layak secara finansial dan berdampak positif bagi masyarakat.
  - a. Survei Masyarakat. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora mengadakan survei untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kebutuhan dan harapan masyarakat terkait berbagai isu, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
  - b. Analisis Kebijakan. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora menganalisis dampak kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemda, serta menyusun

rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian kebijakan yang ada.

- c. Pengumpulan Data. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora mengumpulkan dan menganalisis data statistik untuk mendukung argumentasi dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.
- d. Laporan Penelitian. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora menyusun laporan hasil riset yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Raperda atau program pemerintah yang lebih baik.
- e. Kolaborasi dengan Akademisi. Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora bekerja sama dengan universitas atau lembaga penelitian untuk melakukan riset yang lebih mendalam mengenai isu-isu strategis di daerah.

Dengan kegiatan ini, Ibu Siti Izzati Aziz dan Ibu Fitri Nora berupaya memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data dan informasi yang akurat, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

### **Kesimpulan**

Penelitian ini telah berhasil memperlihatkan dinamika yang cukup menarik mengenai peranan politisi perempuan di Pariaman dalam peta umum sebagai wahana pandangan ulama dan masyarakat Sumatra Barat. Dalam upaya untuk meningkatkan citra dan mendapat legitimasi publik, politisi perempuan di Pariaman memposisikan nilai-nilai Islam sebagai salah satu bagian dari strategi komunikasi mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menghadapi beberapa tantangan yang muncul karena stigma gender dan konsep patriarki yang tetap kuat dalam struktur politik lokal.

Ini menunjukkan bahwa dukungan di antara ulama cukup krusial dalam mendefinisikan citra publik terkait keterlibatan wanita dalam aktivitas politik. Ulama yang mendukung partisipasi wanita dapat memfasilitasi munculnya sikap yang lebih positif. Namun, masih ada pandangan konservatif yang berargumen bahwa tanggung jawab utama wanita harus di sekitar rumah karena budaya Minangkabau, meskipun memiliki fitur matrilineal atau matriarkal, tetap menganggap pria sebagai yang memiliki otoritas di publik.

Temuan penelitian ini mengisi celah dalam pemahaman hubungan antara gender, agama, dan politik dalam konteks Sumatera Barat. Adanya dialog antara politisi perempuan dan ulama muncul sebagai faktor kritis yang dapat mendorong perubahan sosial tetapi perubahan yang dimaksud masih memerlukan pemahaman dan dukungan yang lebih dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Yusuf, Muri, (2014), *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi, (2006), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Astawa, Ida Bagus Made, (2001), *Pengantar Ilmu Sosial*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bugin, Burhan, (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahrendorf, Ralf, (1986), *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisis Kritik*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo, (2016), *Teori Wawancara Psikogdinostik*, Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Emzir, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Emzir, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cet.2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fachrurazi, Delia Meldra, Dkk, (2023), *Konsep Dasar Pengembangan Kewirausahaan*, Batam: Yayasan Candikia Mulia Mandiri.
- George Ritzer & Douglas J Goodman, (2005), *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media.
- George, Ritzer, (2011), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Gerungan, W.A, (1998), *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Eresso.
- Hanani, Silfia, (2020), *Rancangan Penelitian Sosial Keagamaan*, Bukittinggi : LP2M IAIN Bukittinggi Press.
- Hartono, (1996), *Kamus Praktik Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Jones, Pip, (2009), *Pengantar Teori-Teori Sosial, dari Fungsional Hingga Postmodernisme*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat, *Neraca Satelit Pariwisata Daerah NESPADA Provinsi Sumatra Barat 2021*, (2021), Padang: Wonderful Indonesia
- Meleong, Lexy J, (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moch. Wispandono, Nurul Imamah, Herry Yulistiyono, (2022), *Penguatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Berbasis Pemecahan Masalah*, Jakarta: Deepublish.
- Muhammad, (2011), *Metode Penelitian Bahasa*, Jakarta : Ar-Razz Media.
- NI'matuzahroh & Susanty Prasetya Ningrum, (2018), *Observasi : Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Priyadi, Unggul, (2016), *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Robert D Hisrich Dkk, (2008), *Kewirahusahaan Edisi 7*, Jakarta: Penerbit Salemba.
- Rukajat, Ajat, (2018), *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sammeng & Andi Mappi,(2001), *Cakrawala Pariwisata*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Siahaan, Hotman, (1986), *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Surabaya: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono, (2007), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, (2020), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Sudariyanto, (2020), *Interaksi Sosial*, Semarang: Alprin.
- Sutinah, Bagong Suryanto, (2007), *Metode Penelitian Sosial Berbagai Pendekatan*, Jakarta: Kencana.
- Umрати & Hengky Wijaya, (2020), *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian pendidikan*, Makasar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wirawan, Ida Bagus, (2012), *Teori-teori Sistem Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Defenisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Kencana